

**IMPLEMENTASI KEBLIJAKAN DANA DESA DALAM
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA TALANG
BENTENG KECAMATAN MUARA PINANG KABUPATEN
EMPAT LAWANG**

SKRIPSI

Oleh:

Novita Sari

Nomor Induk Mahasiswa 06051281520068

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWLJAYA**

2020

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA TALANG
BENTENG KECAMATAN MUARA PINANG KABUPATEN
EMPAT LAWANG**

SKRIPSI

Oleh:

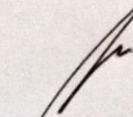
Novita Sari

Nomor Induk Mahasiswa 06051281520068

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengesahkan :

Pembimbing 1,



Drs. Alfiandra, M.Si

NIP. 196702051992031004

Pembimbing 2,

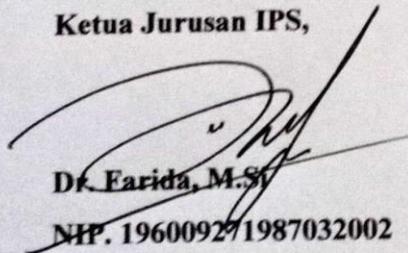


Kurnisar, S.Pd., M.H

NIP. 197603052002121011

Mengetahui :

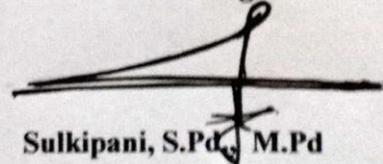
Ketua Jurusan IPS,



Dr. Farida, M.Si

NIP. 196009271987032002

Koordinator Program Studi



Sulkipani, S.Pd., M.Pd

NIP. 198707042015041002

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA TALANG
BENTENG KECAMATAN MUARA PINANG KABUPATEN
EMPAT LAWANG**

SKRIPSI

Oleh:

Novita Sari

Nomor Induk Mahasiswa 06051281520068

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

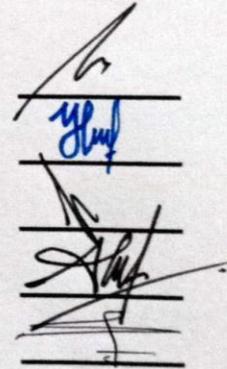
Telah diujikan dan lulus pada:

Hari : Sabtu

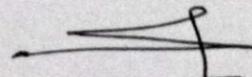
Tanggal : 22 Februari 2020

TIM PENGUJI

- 1. Ketua : Drs. Alfiandra, M.Si**
- 2. Sekretaris : Kurnisar, S.Pd., M.H**
- 3. Anggota : Drs. Emil El Faisal, M.Si**
- 4. Anggota : Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si**
- 5. Anggota : Sulkipani, S.Pd., M.Pd**



**Palembang, Februari 2020
Mengetahui,
Koordinator Program Studi**



**Sulkipani, S.Pd., M.Pd
NIP. 198707042015041002**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novita Sari

NIM : 06051281520068

Jurusan : Pendidikan IPS

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa adanya pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, Desember 2019
Yang membuat pernyataan



Novita Sari
NIM. 06051281520068

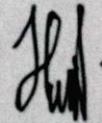
PRAKATA

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs.Alfiandra.M.Si dan Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H., sebagai pembimbing atas segala bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis skripsi ini. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Prof. Sofendi, M.A., Ph.D., selaku Dekan FKIP Universitas Sriwijaya., Ibu Dr. Farida., M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan IPS FKIP Unsri, dan Bapak Sulkipani., S.Pd., M.Pd selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Ibu Dr. Hj.Umi Chotimah,M.Pd, Ibu Sri Artati Waluyati, M.Si., Bapak Drs. Emil El Faisal, M.Si., dan Bapak Sulkipani, S.Pd., M.Pd., sebagai anggota penguji yang telah memberikan saran untuk perbaikan skripsi ini. Lebih lanjut penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi PPKn FKIP Universitas Sriwijaya dan Pemerintah Desa Talang Benteng yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Palembang, Desember 2019
Penulis,



Novita Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Permasalahan Penelitian.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Implementasi Kebijakan Dana Desa.....	11
2.1.1 Pengertian Kebijakan.....	11
2.1.2 Implementasi Kebijakan.....	11
2.1.3 Model Implementasi Kebijakan.....	12
2.1.4 Pengertian Kebijakan Dana Desa.....	13
2.2 Pembangunan Desa.....	16
2.2.1 Pengertian Pembangunan Desa.....	16
2.2.2 Tujuan Pembangunan Desa.....	17
2.2.3 Pemerintah Desa.....	18
2.3 Kerangka Berpikir.....	19
2.4 Alur Penelitian.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian.....	23
3.2 Variabel Penelitian.....	23
3.3 Definisi Operasional Variabel.....	24
3.4 Tempat Penelitian.....	26
3.5 Populasi dan Sampel.....	27
3.6 Subjek Penelitian.....	27
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.7.1 Dokumentasi.....	28
3.7.2 Wawancara.....	28

3.7.3 Observasi.....	29
3.8 Teknik Analisa Data.....	30
3.8.1 Reduksi Data.....	30
3.8.2 Penyajian Data.....	31
3.8.3 Penarikan Kesimpulan.....	32
3.9 Uji Keabsahan Data.....	32
3.9.1 Uji kredibilitas.....	32
3.9.2 Uji Dependabilitas.....	34
3.9.3 Uji Konfirmabilitas.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	36
4.1.1 Deskripsi Data Hasil Dokumentasi.....	46
4.1.1.1 Dasar Hukum Kebijakan Dana Desa di Desa Talang Benteng.....	38
4.1.1.2 Gambaran Desa Talang Benteng.....	38
4.1.1.3 Jumlah Penduduk.....	39
4.1.1.4 Agama.....	40
4.1.1.5 Pendidikan.....	40
4.1.1.6 Potensi Sumber Daya Alam Desa Talang Benteng.....	40
4.1.1.7 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Talang Benteng.....	41
4.1.1.8 Struktur Kepengurusan Pemerintah Desa Talang Benteng.....	41
4.1.1.9 Sarana dan Prasarana Desa Talang Benteng.....	42
4.1.2 Deskripsi Data Hasil Wawancara.....	43
4.1.2.1 Deskripsi Data Hasil Wawancara Informan.....	44
4.1.2.1.1 Deskripsi Hasil Wawancara Indikator Utama.....	44
4.1.2.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara Indikator Kedua.....	47
4.1.2.1.3 Deskripsi Hasil Wawancara Indikator Ketiga.....	51
4.1.2.1.4 Deskripsi Hasil Wawancara Indikator Keempat.....	55
4.1.2.2 Deskripsi Data Hasil Wawancara Informan Pendukung.....	58
4.1.2.2.1 Deskripsi Hasil Wawancara Indikator Utama.....	59
4.1.2.2.2 Deskripsi Hasil Wawancara Indikator Kedua.....	60
4.1.2.2.3 Deskripsi Hasil Wawancara Indikator Ketiga.....	63
4.1.2.2.4 Deskripsi Hasil Wawancara Indikator Keempat.....	65
4.1.3 Deskripsi Daftar Hasil Observasi.....	68
4.2 Analisis Data Hasil Penelitian.....	69
4.2.1 Analisis Data Hasil Dokumentasi.....	69
4.2.2 Analisis Data Hasil Wawancara.....	71
4.2.3 Analisis Data Hasil Observasi.....	81
4.3 Pembahasan.....	93

BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan.....	99
5.2 Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN.....	103

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Anggaran Dana Desa di Kecamatan Muara Pinang.....	7
Tabel 2 Alokasi Dana Desa di Desa Talang Benteng.....	8
Tabel 3 Tahap Pencairan Dana Desa.....	8
Tabel 4 Definisi Operasional Variabel.....	24
Tabel 5 Jumlah Subjek Penelitian.....	27
Tabel 6 Teknik Pengumpulan Data.....	29
Tabel 7 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	36
Tabel 8 Jumlah Penduduk Desa Talang Benteng	39
Tabel 9 Sumber Daya Alam Desa Talang Benteng.....	40
Tabel 10 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Talang Benteng.....	41
Tabel 11 Struktur Kepengurusan Pemerintah Desa Talang Benteng.....	41
Tabel 12 Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	42
Tabel 13 Sarana dan Prasarana Kesehatan.....	42
Tabel 14 Sarana Dan Prasarana Peribadatan.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	20
Gambar 2.2 Alur Penelitian.....	22

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Usul Judul Skripsi
- Lampiran 2. Surat Pengesahan Usul Judul Skripsi dari Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3. Surat Persetujuan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 4. Surat Perbaikan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 5. Surat Keterangan Telah Melakukan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 6. Surat Keterangan Pengajuan Perubahan Usul Judul Skripsi
- Lampiran 7. Surat Kesediaan Pembimbing Skripsi (Pembimbing 1)
- Lampiran 8. Surat Kesediaan Pembimbing Skripsi (Pembimbing 2)
- Lampiran 9. Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 10. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 11. Surat Izin Penelitian Dekan FKIP Universitas Sriwijaya
- Lampiran 12. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Dari Kepala Desa Talang Benteng
- Lampiran 13. Surat Izin Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 14. Surat Persetujuan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 15. Surat Keterangan Telah Melakukan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 16. Surat Izin Perbaikan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 17. Surat Izin Ujian Skripsi
- Lampiran 18. Kisi-kisi Instrumen Wawancara
- Lampiran 19. Instrumen Wawancara
- Lampiran 20. Kartu Bimbingan Skripsi (Pembimbing 1)
- Lampiran 21. Kartu Bimbingan Skripsi (Pembimbing 2)
- Lampiran 22. Foto-foto Saat Kegiatan Penelitian

**Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa
Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang**

Oleh:
Nama: Novita Sari
NIM: 06051281520068
Pembimbing: (1) Drs. Alfiandra, M.Si
(2) Kurnisar S.Pd. M.Pd.
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

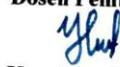
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa di desa Talang Benteng kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif sehingga yang menjadi situasi sosial dalam penelitian ini adalah “ Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa “ dengan rincian Desa Talang Benteng sebagai tempat yang diteliti, Pemerintah Desa sebagai pelaku, dan Implementasi kebijakan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa sebagai aktivitas yang diteliti. Sampel yang diperoleh menggunakan *snowball sampling* dengan jumlah informan tiga orang yaitu Kepala Desa, Bendahara Desa dan Sekretaris Desa. Uji keabsahan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu uji *credibility*, uji *dependability*, uji *transferability*, dan uji *confirmability*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Berdasarkan hasil analisis data dokumentasi, wawancara, dan observasi dapat diketahui ada empat Indikator yang harus dipenuhi agar Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang berjalan optimal yaitu *pertama*, komunikasi, *kedua*, sumber daya, *ketiga*, sikap pelaksana dan yang *keempat*, struktur birokrasi. Adapun hasil yang diperoleh berupa dana desa digunakan untuk (1) penyelenggaraan pemerintahan, (2) pembangunan desa, (3) pemberdayaan masyarakat dan (4) pembinaan kemasyarakatan.

Kata-kata kunci: *Implementasi, Kebijakan Dana Desa, Pembangunan Desa*

Dosen Pembimbing 1,


Drs. Alfiandra, M.Si.
NIP.196702051992031004

Dosen Pembimbing 2,


Kurnisar, S.Pd., M.H.
NIP.197603052002121011

Mengetahui,

Koordinator Program Studi PPKn


Sulkipani, S.Pd., M.Pd
NIP. 198707042015041002

**Implementation of the Village Fund Policy in Increasing Village Development in Talang
Benteng Village Muara Pinang Sub-District Empat Lawang Regency**

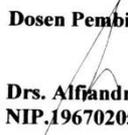
Name: Novita Sari
NIM: 06051281520068
Advisor: (1) Drs. Alfiandra, M.Si
(2) Kurnisar S.Pd. M.Pd.
Pancasila and Citizenship Education Study Program

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the Village Fund policy in increasing village development in Talang Benteng village, Muara Pinang sub-district, Empat Lawang Regency, this study used a descriptive method with a qualitative approach. The social situation in this study is "Implementation of Village Fund Policies in Improving Village Development "With the details of Talang Benteng Village as the place to be investigated, the Village Government as the actor, and the implementation of the Village Fund policy in Increasing Village Development as the activity under study. Samples obtained in this study was using snowball sampling with the number of informants three people, namely the Village Head, Village Treasurer and Village Secretary. The validity test conducted in this study is the credibility test, dependability Test, transferability test, and confirmability test. Documentation, interviews, and observations were used to collect the data. Reduction data, presentation data, and verification data were used as an analysis techniques. Based on the analysis of documentation, interview and observation data, it can be seen that there were four Indicators that must be fulfilled so that the Implementation of Village Fund Policy will improve Village Development in Talang Benteng Village, Muara Pinang, Empat Lawang District runs optimally, firstly, communication, second resources, thirdly, propriety, fourth, bureaucratic structure. As for the results obtained by the village funds used for (1) the government arrangement, (2) village development. (3) public empowerment, (4) public development.

Key words : *Implementation, Village Fund Policy, Village Development*

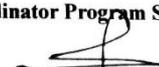
Dosen Pembimbing 1,


Drs. Alfiandra, M.Si.
NIP.196702051992031004

Dosen Pembimbing 2,


Kurnisar, S.Pd., M.H.
NIP.197603052002121011

Mengetahui,
Koordinator Program Studi PPKn


Sulkipani, S.Pd., M.Pd
NIP. 198707042015041002

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, Luas wilayah negara Indonesia yakni 5.180.053 km², yang terdiri atas wilayah daratan seluas 1.922.570 km² dan wilayah lautan seluas 3.257.483 km². Di wilayah yang seluas itu, tersebar 13.466 pulau yang terbentang antara Sabang dan Merauke. Pulau-pulau tersebut bukanlah wilayah - wilayah yang terpisah, tetapi membentuk suatu kesatuan yang utuh. (Tolib dkk, 2017 : 53). Seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 25A Undang - Undang Dasar (UUD) tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas batas dan hak haknya ditetapkan dengan undang-undang.”

Di wilayah yang sangat luas itu tentunya Indonesia juga memiliki banyak provinsi, kota/kabupaten, Indonesia saat ini memiliki 34 provinsi, di setiap provinsi tersebut terdiri dari kota/kabupaten, dan di setiap kota/kabupaten juga memiliki pembagian wilayahnya lagi mulai dari kecamatan, kelurahan hingga desa, misalnya di provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 17 kota/kabupaten, dan di setiap kota/kabupatennya itu juga memiliki pembagian wilayahnya lagi. ([https://ilmupengetahuanumum.com/pembagian-wilayah-provinsi-di-indonesia/.](https://ilmupengetahuanumum.com/pembagian-wilayah-provinsi-di-indonesia/)) Diakses pada tanggal 14 September 2018. Melihat penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia ini memiliki wilayah yang sangat luas dan hal itu tidak memungkinkan negara Indonesia hanya dikelola oleh pemerintah pusat saja, maka dari itu Indonesia menganut sistem otonomi daerah di mana setiap daerah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan, otonomi daerah juga bertujuan untuk memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata serta bertanggung jawab terutama dalam mengatur, mengelola, dan memanfaatkan sumber potensi yang ada di daerah masing - masing. Jadi setiap daerah itu memiliki pemerintahan daerahnya masing -

masing baik di tingkat provinsi, kota/kabupaten dan seterusnya. Mengenai Pemerintahan Daerah, sudah diatur dalam Pasal 18 Undang - Undang Dasar (UUD) tahun 1945 yang menjelaskan :

“Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak hak usul dalam Daerah - daerah yang bersifat istimewa.” (Pustaka Sandro, 2014 : 58)

Dapat disimpulkan dari pernyataan di atas bahwa pemerintahan di Indonesia terdiri atas daerah besar dan kecil, yakni terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kota/daerah, maupun pemerintah desa. pemerintah provinsi itu dipimpin oleh Gubernur, pemerintah kota/kabupaten dipimpin oleh Walikota/Bupati sedangkan pemerintah desa di pimpin oleh Kepala Desa, Indonesia memiliki banyak desa yang tersebar mulai dari Sabang hingga Merauke.

Menurut Undang - Undang (UU) Nomor. 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Fokusindo, 2016 : 2)

Desa di Indonesia kurang lebih berjumlah 74.093, tetapi walaupun terdiri dari banyak desa, desa desa tersebut masih banyak di kategorikan sebagai desa tertinggal. Berdasarkan data dari Indeks Pembangunan Desa 2014 yang di susun kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bapennas dan Badan Pusat Statistik jumlah desa tertinggal mencapai 20.167 desa jumlah tersebut mencapai 27,22% dari total jumlah desa di Indonesia yang berjumlah 74.093 desa. (<http://amp.kontan.co.id/news/sebanyak-2722-desa-di-indonesia-masihtertiggal>). Di akses pada tanggal 15 September 2018. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa di Indonesia saat ini masih banyak desa yang tertinggal dan memerlukan bantuan dari pemerintah agar dapat meningkatkan pembangunan desa,

dan mewujudkan salah satu cita-cita bangsa Indonesia yakni memajukan kesejahteraan umum atau kesejahteraan bersama.

Terkait hal tersebut pemerintah menetapkan Undang - Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa untuk mempertegas posisi desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), penetapan Undang - Undang tersebut memperjelas tugas, peran, dan fungsi desa dalam mengelola desa, menjalankan pemerintahan desa, dan memberikan pelayanan bagi masyarakat agar terwujudnya cita cita bersama untuk mensejahterakan masyarakat.

Adapun sebagai upaya untuk mengatasi masalah yang sudah dituliskan di atas serta menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan salah satu kebijakan yang mengiringi penetapan Undang – Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu kebijakan dana desa, sebagaimana sudah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa, dana desa bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang dialokasikan bagi desa, dana tersebut di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Fokusindo, 2016 : 186) Pada dasarnya kebijakan dana desa bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Melalui dana desa yang jumlahnya tidak sedikit dan mencapai miliaran rupiah, hal itu memungkinkan suatu desa melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa untuk mewujudkan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan kebijakan dana desa tersebut, Anderson (dalam Winarno, 2014 : 21) menjelaskan bahwa kebijakan merupakan tindakan yang memiliki tujuan dan ditetapkan oleh pejabat atau pemerintah dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Selanjutnya di kemukakan oleh Dye (dalam Winarno 2014 : 20) yakni kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Jadi berdasarkan pendapat ahli di atas dapat di simpulkan bahwa kebijakan itu merupakan usaha atau tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi atau menyelesaikan suatu persoalan.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan skala nasional dan daerah, karena terkandung unsur

pemerataan pembangunan di Indonesia. Dalam pembangunan desa, pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas dan kewajiban desa maka dibutuhkannya sumber pendapatan desa.

Menurut Peraturan dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 114 Tahun 2014 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan masyarakat secara partisipatif pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa, tujuan pembangunan desa itu sendiri menurut Undang – Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Menurut Hehamahua (dalam Winarni dkk, 2016) adapun tujuan utama dari pembangunan yaitu meningkatkan distribusi pembangunan dan program lainnya pada wilayah pedesaan. Artinya wilayah pedesaan itu merupakan subjek pembangunan yang bertumpu pada prinsip otonomi daerah yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah melalui penguatan potensi lokal yang dimiliki oleh setiap daerah. Selanjutnya pembangunan ataupun kebijakan dapat terwujud apabila adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Kerja sama dalam menjalankan sebuah kebijakan dibutuhkan prinsip-prinsip umum sebagaimana dijelaskan oleh Rondinelli (dalam Keban, 2014 : 38) prinsip umum yang terdapat dalam prinsip *good governance* antara lain :

- (1) Partisipasi
- (2) *Rule of law*
- (3) Transparansi
- (4) Responsif
- (5) Konsensus
- (6) Keadilan

- (7) Efektivitas dan Efisiensi
- (8) Akuntabilitas
- (9) Strategi

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dikeluarkannya kebijakan dana desa yaitu untuk pemerataan pembangunan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan, karena selama ini banyak desa di Indonesia yang dikategorikan sebagai desa tertinggal, maka dari itu diharapkan dengan adanya kebijakan dana desa ini pembangunan desa yang ada di Indonesia lebih baik lagi dari sebelumnya karena pada dasarnya selama ini banyak desa yang kekurangan dana dalam membangun dan mengembangkan potensi yang ada di setiap daerah masing - masing.

Dana Desa itu diberikan oleh pemerintah kepada seluruh desa yang ada di Indonesia mulai dari wilayah Sabang sampai Merauke. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016 tentang dana desa menjelaskan bahwa dana desa bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Fokusindo, 2016 : 270)

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan desa sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti, penelitian pertama yang dilakukan oleh (Sofiyanto,dkk. 2016) dengan judul penelitian pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di desa Banyuates Kecamatan. Banyuates Kabupaten. Ampang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan dana desa memiliki dampak positif bagi pembangunan desa dan pengelolaan dana desa sudah berjalan dengan baik hal itu dibuktikan dengan adanya surat pertanggung jawaban (SPJ) dan buku kas desa. (<https://riset.unisma.ac.id>). Diakses pada tanggal 17 september 2018. Selanjutnya penelitian juga dilakukan oleh (Chasanah dkk, 2017) dengan judul penelitian implementasi kebijakan dana desa. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan dana desa belum berjalan dengan optimal karena masih memiliki

banyak kendala seperti kurangnya ketepatan layanan yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan dana desa belum sesuai, dan dana desa hanya terfokuskan untuk pembangunan infrastruktur saja. (<http://journal.uta45jakarta.ac.id>). Diakses pada tanggal 18 September 2018. Selanjutnya dilakukan oleh Winarni,dkk (2016) dengan judul penelitian implementasi kebijakan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di desa Wukirsari, Kabupaten. Sleman, Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Kebijakan dana desa sudah berjalan dengan baik dan hal tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, faktor komunikasi, tingkat kecukupan sumber daya, struktur birokrasi dan faktor disposisi. (<https://journal.uny.ac.id>). Diakses pada tanggal 18 September 2018

Dari hasil penelitian terdahulu dapat di simpulkan bahwa kebijakan dana desa itu sebagian sudah berjalan dengan baik dan optimal tetapi sebagian lagi belum optimal karena hanya berfokus kepada pembangunan infrastruktur dan belum memperhatikan pemberdayaan masyarakatnya, selain itu keberhasilan implementasi kebijakan dana desa itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, faktor komunikasi, tingkat kecukupan sumber daya, struktur birokrasi dan faktor disposisi. Selain itu sebelumnya sudah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 60 tahun 2014 tentang dana desa bahwa dana desa bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang dialokasikan bagi desa, dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, tetapi kebanyakan dana desa tersebut hanya di gunakan untuk pembangunan infrastruktur dan belum untuk pembangunan sumber daya manusianya atau sering disebut pemberdayaan masyarakatnya, hal tersebut bisa dilihat dari pembangunan yang sudah dilaksanakan, umumnya dana desa tersebut dialokasikan untuk pembangunan jalan ataupun perbaikan perbaikan dalam bentuk bangunan, walaupun sebenarnya sebagian kecil juga sudah ada yang mengalokasikan dana tersebut untuk pemberdayaan masyarakatnya seperti dibentuknya badan usaha milik desa (BUMDES),

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti dengan mencari informasi dan melakukan wawancara terhadap Kepala Desa Talang

Benteng pada tanggal 12 September 2018 mengatakan bahwa Dana desa merupakan bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah terhadap desa untuk kepentingan pembangunan desa, baik berupa pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan. Pada saat melakukan studi pendahuluan peneliti mendapatkan data sebagai berikut :

Tabel 1.1 Anggaran Dana Desa di Kecamatan Muara Pinang

No	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa	Pagu Dana Desa Tahap I (20%)	Pagu Dana Desa Tahap II (40%)	Pagu Dana Desa Tahap III (40%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Padang Burnai	745.668.000	149.133.600	298.267.200	298.267.200
2	Batu Jungul	844.218.000	168.843.600	337.687.200	337.687.200
3	Tanjung Tawang	851.542.000	170.308.400	340.616.800	340.616.800
4	Seleman Ulu	967.213.000	193.442.600	386.885.200	386.885.200
5	Talang Baru	771.669.000	154.339.800	308.679.600	308.679.600
6	Tanjung Kurung	829.427.000	165.885.400	331.770.800	331.770.800
7	Muara Pinang Lama	821.816.000	164.363.200	328.726.400	328.726.400
8	Niur	839.457.000	167.891.400	335.782.800	335.782.800
9	Suka Dana	956.480.000	191.296.000	382.592.000	382.592.000
10	Lubuk Tanjung	846.864.000	169.372.800	338.745.600	338.745.600
11	Belimbing	747.793.000	149.558.600	299.117.200	299.117.200
12	Pajar Menang	816.588.000	163.317.600	326.635.200	326.635.200
13	Seleman Ilir	807.055.000	161.411.000	322.822.000	322.822.000
14	Talang Benteng	1.372.121.000	184.764.200	593.678.400	593.678.400
15	Muara Semah	808.874.000	161.774.800	323.549.600	323.549.600
16	Muara Timbuk	812.356.000	162.471.200	324.942.400	324.942.400
17	Batu Galang	796.846.000	159.369.200	318.738.400	318.738.400
18	Gedung Agung	820.414.000	164.082.800	328.165.600	328.165.600
19	Muara Pinang Baru	874.075.000	174.815.000	349.630.000	349.630.000
20	Lubuk Ulak	774.845.000	154.969.000	309.938.000	309.938.000
21	Sapa Panjang	836.264.000	167.252.800	334.505.600	334.505.600
22	Sawah	909.440.000	181.888.000	363.776.000	363.776.000

Sumber : Camat Muara Pinang, Tahun 2019

Tabel 1.2 Jumlah Alokasi Dana Desa di Desa Talang Benteng

No	Bidang/ Jenis Kegiatan	Jumlah biaya (Rp)
1.	Pembangunan Infrastruktur	736.550.100
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan	310.500.400
3.	Pembinaan kemasyarakatan	131.365.500
4.	Pemberdayaan masyarakat	175.283.400
	Total	1.372.121.000

(Sumber: Kepala desa Talang Benteng, Tahun 2019)

1.3 Tabel Tahap Pencairan Dana Desa

No	Tahun	Tahap 1 (%)	Tahap 2 (%)	Tahap 3 (%)
1	2015	60	40	
2	2016	60	40	
3	2017	60	40	
4	2018	20	40	40

(Sumber : Kepala desa Talang Benteng, Tahun 2019)

Dari data diatas dapat di simpulkan bahwa di kecamatan Muara Pinang yang terdiri dari 22 desa, semua desa tersebut telah mendapatkan dana desa, tetapi tidak semua desa mengalokasikan dana desa tersebut dengan baik, karena sebagian desa hanya dominan mengalokasikan dana tersebut pada pembangunan desa yang berupa pembangunan infrastruktur, kebijakan dana desa dianggap berjalan dengan baik dan optimal apabila telah tercapainya tujuan dari dana desa itu sendiri, menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa, dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Di desa talang benteng pada saat peneliti melakukan studi pendahuluan peneliti mendapatkan data sebagai berikut dana desa di alokasikan pada penyelenggaraan pemerintah berupa penghasilan dan tunjangan perangkat desa, operasional desa. Lalu pada pelaksanaan pembangunan, dana desa sudah dialokasikan untuk pembangunan jalan dan pembangunan saluran pembuangan air limbah (SEPAL), selanjutnya pemberdayan masyarakat pemerintah desa talang benteng sudah

mengalokasikan dana tersebut untuk budidaya ayam petelur, dan terakhir pembinaan kemasyarakatan pemerintah desa sudah mengalokasikan dana tersebut untuk pemberian insentif terhadap guru mengaji di desa tersebut. Tetapi pembangunan untuk pelayanan dasar belum terlaksana dengan baik, mengapa demikian karena kantor desa dan balai desa yang seharusnya menjadi salah satu tempat penting bagi sebuah desa untuk menjalankan ataupun melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah desa ataupun masyarakat desa tidak terawat dengan baik, kantor desa dan balai desa tersebut terbengkalai dan tidak terurus. Pencairan Dana desa tahap pertama biasanya diberikan kepada pemerintah desa pada bulan April atau bulan Mei dan untuk pencairan dana desa tahap selanjutnya sesuai dengan selesainya rencana pembangunan pada dana desa yang diberikan pada tahap pertama.

Berdasarkan latar belakang dan hasil studi pendahuluan yang sudah diuraikan di atas peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang bagaimana implementasi kebijakan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa, karena dengan melakukan penelitian ini peneliti dapat memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan Implementasi kebijakan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa apakah sudah berjalan dengan optimal atau belum optimal di daerah kabupaten Empat Lawang khususnya di desa Talang Benteng Kecamatan. Muara Pinang.

Penelitian ini penting untuk dilakukan agar selanjutnya dapat memberikan informasi bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa di desa Talang Benteng, dan apa saja kendala dan hambatan implementasi kebijakan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa di desa Talang Benteng, karena adanya hal tersebut peneliti ingin mengadakan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti diatas, maka peneliti merumuskan masalah yakni bagaimana implementasi kebijakan dana desa

dalam pembangunan desa di desa Talang Benteng kecamatan Muara Pinang kabupaten Empat Lawang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan desa di desa Talang Benteng kecamatan Muara Pinang kabupaten Empat Lawang.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran sehingga bermanfaat untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagi mahasiswa mengenai tindakan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan

1.4.2 Secara Praktis

1.4.2.1 Bagi Pemerintah

Penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan evaluasi pemerintah sehingga dapat memberikan acuan pemerintah dalam bertindak agar implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan desa di desa Talang Benteng kecamatan Muara Pinang kabupaten Empat Lawang berjalan dengan baik.

1.4.2.2 Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat agar masyarakat mengetahui kinerja serta alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa.

1.4.2.3 Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan dan wawasan kepada peneliti mengenai implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan desa di desa Talang Benteng kecamatan Muara Pinang kabupaten Empat Lawang .

DAFTAR PUSTAKA

- Afni, W. (2013). **Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupal Kabupaten Bengkalis.** <https://repository.uin-suska.ac.id>.
Diakses pada tanggal 2 Oktober 2018
- Agustino, L. (2017). *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: C.V Alfabeta
- Arista, M. Y. dkk. (2015). **Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung).** [https://media.neliti.com/media/publications/28619-ID-
implementasi-kebijakanalokasi-dana-desa-studi-kasus-di-desa-dalung-kecamatan-ku.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/28619-ID-implementasi-kebijakanalokasi-dana-desa-studi-kasus-di-desa-dalung-kecamatan-ku.pdf).
Diakses pada tanggal 17 September 2018
- Chasanah, K. dkk. (2017) **Implementasi Kebijakan Dana Desa.** <https://journal.uta45jakarta.ac.id>. Diakses pada tanggal 18 September 2018
- Dickson.(2014).**Pembagian Wilayah Provinsi di Indonesia.** <https://ilmupengetahuanumum.com/pembagian-wilayah-provinsi-di-indonesia/>.
Diakses pada tanggal 14 September 2018
- Fokusindo Mandiri. (2016). *Undang – Undang Desa dan Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa*. Bandung: Fokusindo Mandiri
- Hamdi, M. (2015). *Kebijakan Publik (Proses, Analisis, dan Partisipasi)*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Kartasapoetra. 1986. *Desa dan Daerah dengan tata pemerintahannya*. Jakarta: Bina Aksara
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori, dan Isu)*. Yogyakarta: Gava Media
- Kementerian Keuangan, (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan
- Pustaka Sandro Jaya. (2014). *UUD 1945 dan Amandemen Untuk Pelajar dan Umum*. Jakarta: Pustaka Sandro Jaya

Sajogyo, P. (1989). *Sosiologi Pedesaan Jilid 2*. Yogyakarta : Gadjah Mada University

Press Sofiyanto, M. dkk. (2016). **Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates**

Kabupaten Sampang. <https://riset.unisma.ac.id>. Diakses pada tanggal 17 September 2018

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: C.V Alfabeta

Suseno, D. A. (2016). **Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Undang**

Undang Desa No 6 Tahun 2014 Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

<https://media.neliti.com/media/publications/131462-ID-analisis-perencanaan-pembangunan-des-a-be.pdf>. Diakses pada tanggal 4 Oktober 2018

Tolib, dkk. (2017). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X*. Jakarta :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Triyono, A. (2015). **Sebanyak 27,22 % Desa di Indonesia masih tertinggal**.

<http://amp.kontan.co.id/news/sebanyak-2722-des-a-di-indonesia-masih-tertiggal>. Diakses pada tanggal 15 September 2018

Wahab, S. A. (2016). *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi Penyusunan, Model – Model Implementasi Kebijakan publik)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarni, F. dkk. (2016). **Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Meningkatkan**

Pembangunan Di Desa Wukirsari, Kabupaten Sleman. <https://journal.uny.ac.id>. Diakses pada tanggal 15 September 2018.

Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Yin, R. K. (2015). *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.